

## HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN JERMAN DALAM PEMBANGUNAN SDM UNTUK *GREEN ECONOMY* SEBAGAI POIN KETUJUH *SDGs*

Rahmatullah<sup>1</sup>, Yusuf Dj. Hasani<sup>2</sup> dan Serli Marselina Nguru Diu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jakarta

<sup>1,2,3</sup> Jl. Pulomas Barat Villa Tanah Mas, Jakarta Timur 13210, Indonesia.

Email: Serlidioe12@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received :

29 August 2024

Revised :

05 September 2024

Accepted :

23 September 2024

**Kata Kunci:** Kerjasama Internasional; Ekonomi Hijau; Pembangunan SDM; SDGs; Proyek ISED

**Keywords:** International Cooperation; Green Economy; Human Resources Development; SDGs; ISED Project

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisa dan menjelaskan tentang fokus kerjasama dalam proyek ISED antara Indonesia - Jerman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi naratif. Fokus kerjasama proyek ISED dibagi menjadi dua tahap, tahap yang pertama yaitu pariwisata dan manufaktur, tahap yang kedua adalah bidang energi terbarukan. Yang dicapai dengan mengembangkan SDM terampil bagi pekerjaan layak dan ramah lingkungan (*Green Jobs*) untuk mendukung ekonomi hijau melalui strategi *Green Economy*. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk Pemerintah, Organisasi Internasional, NGO, akademisi dan juga kepada pihak yang berkepentingan.

### Abstract

This study aims to determine, understand, analyze and explain the focus of cooperation in the ISED project between Indonesia - Germany. This study uses a qualitative method with a narrative description approach. The focus of the ISED project cooperation is divided into two stages, the first stage is tourism and manufacturing, the second stage is the renewable energy sector. Which is achieved by developing skilled human resources for decent and environmentally friendly work (*Green Jobs*) to support the green economy through the *Green Economy* strategy. The results of this study are recommended for the Government, International Organizations, NGOs, academics and also to interested parties.

## PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jerman telah terjalin sejak tahun 1952. Hubungan Jerman dengan Indonesia merupakan hubungan persahabatan terpanjang Jerman dengan negara-negara di luar Eropa. Kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jerman, melalui Proyek Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif (ISED), yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan dilaksanakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Dari 2017 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. ISED berfokus pada mempromosikan peluang kerja untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Fokus kerja sama yang tertuang dalam ISED, jelas terlihat bahwa program ini merupakan pemenuhan poin ketujuh dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu energi bersih dan terjangkau. Energi dan penggunaannya harus seefisien mungkin, berkelanjutan dan terbarukan. Selama 20 tahun terakhir, banyak negara telah membuat langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Jika semua teknologi energi dan efisiensi yang tersedia saat ini digunakan, konsumsi energi dapat dikurangi secara signifikan sekitar sepertiga. Namun, hanya sebagian kecil dari potensi ini yang direalisasikan. Tujuan ISED yang berhubungan dengan SDGs adalah untuk mempromosikan lapangan kerja hijau di sektor energi, khususnya di bidang energi terbarukan, dengan keterlibatan yang kuat dan terkoordinasi dari sektor swasta dan publik. Untuk mencapai tujuannya, kursus pelatihan yang berhubungan dengan Renewable Energy harus direformasi dan kursus pelatihan berorientasi pasar tenaga kerja baru yang

inovatif diperkenalkan, dan juga memfasilitasi peningkatan kerangka kelembagaan dan peraturan untuk memastikan promosi pekerjaan hijau dalam jangka panjang. Menurut laporan World Economic Forum (WEF) 2019, Indonesia turun lima peringkat ke peringkat 50, dibandingkan tahun sebelumnya di posisi ke-45. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan pembenahan struktural untuk meningkatkan daya saing nasional. Salah satu faktor yang menyebabkan turunnya indeks daya saing Indonesia adalah terkait dengan masih relatif rendahnya tingkat pendidikan sumber daya manusia. Salah satu pilar penting pelaksanaan proyek ISED adalah pengembangan sumber daya manusia yang tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja. Dalam proyek ISED, pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang sudah ada, yaitu dalam pengembangan usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif, menurut Margono, analisis data yang diterima (berupa kata-kata, gambar atau perilaku) dan bukan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi dengan menjelaskan atau menggambarkan situasi/kondisi yang diteliti dalam penelitian menggunakan bentuk deskripsi naratif (Margono, 2003:39). Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan Lexy J. Moleong (2014:137-138), yang menurutnya data yang dikumpulkan selama penelitian kualitatif berupa kata-kata dan gambar, bukan angka.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan berdasarkan data sekunder (yaitu data yang dikumpulkan dan mungkin dianalisis oleh orang lain), yaitu studi kepustakaan dan sumber pendukung lainnya seperti buku dan jurnal kerjasama Indonesia-Jerman terutama tentang Green Economy dan SDGs dalam proyek ISED. Selain itu, peneliti memiliki akses ke media massa dan media internet yang sudah tersedia apa adanya. Peneliti juga mengunduh beberapa website dari internet yang membahas tentang Hubungan Kerjasama Indonesia-Jerman dalam Pembangunan SDM untuk Green Economy sebagai Poin Ketujuh SDGs. Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Basrowi & Suwandi, 2008:209) terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gagasan mengenai green economy merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep pembangunan berkelanjutan. Secara historis, pembangunan berkelanjutan lahir karena kecemasan dunia akibat pembangunan yang begitu padat tahun 1960-an dan 1970-an. Dunia dikejutkan oleh kabut dan udara buram di Eropa, penyakit Minamata di Jepang dan sunyinya kicauan burung pada musim semi Amerika Serikat. Saat itu, dunia prihatin dengan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia diadakan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia ([www.un.org](http://www.un.org)). Terdapat 26 poin utama mengenai isu lingkungan dan pembangunan yang didapatkan dari deklarasi tersebut ([www.un.org](http://www.un.org)), diantaranya:

1. Hak asasi manusia dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sungguh-sungguh untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
2. Sumber daya alam bumi harus dilindungi melalui perencanaan yang matang atau pengelolaan yang tepat untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
3. Kapasitas bumi untuk menghasilkan energi terbarukan harus dilestarikan dan ditingkatkan.
4. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi harus menjaga dan mengelola dengan bijak warisan satwa liar dan habitatnya
5. Sumber daya bumi yang tidak dapat diperbarui harus digunakan secara adil dan dengan cara terbaik untuk melindungi dari ancaman penipisan sumber daya ini di masa depan.
6. Polusi dalam jumlah yang melebihi kapasitas lingkungan bisa membersihkan secara alami harus dihentikan untuk memastikan bahwa kerusakan serius atau permanen tidak terjadi atas ekosistem.
7. Kebijakan perlindungan lingkungan dari semua negara harus memperkuat potensi pembangunan negara berkembang, tidak merusak dan menghambat mereka sekarang atau di masa depan.
8. Negara-negara berkembang membutuhkan dana untuk melestarikan dan memperbaiki lingkungan, dan untuk ini mereka membutuhkan bantuan teknis dan keuangan internasional tambahan.
9. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya sangat dibutuhkan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan baik.

10. Semua negara diharuskan bekerjasama dalam hal perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, berdasarkan data paritas daya beli produk domestik bruto, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pada 2024, Indonesia akan mengisi daftar lima negara kekuatan ekonomi dunia. Namun, ramalan yang menggembirakan ini menghadapi tantangan serius dari dunia internasional untuk Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk ekonomi hijau.

Pembangunan Indonesia telah berjalan sesuai rencana sejak tahun 1967, yang dikenal dengan istilah pembangunan terencana. Saat itu, Bappenas atau Kementerian Perancang Pembangunan Nasional adalah lembaga yang bertugas menyusun rencana pembangunan nasional untuk memenuhi tuntutan Trikora, terutama yang berkaitan dengan permintaan penurunan harga. Satu-satunya cara berkelanjutan untuk mengurangi inflasi adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi. Pangan sebagai kebutuhan dasar hidup yang paling penting merupakan tujuan utama (BAPPENAS, 2012).

Upaya pengamanan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang disebut juga ketahanan pangan, juga dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi untuk menyediakan energi bagi pembangunan dan sebagai sumber devisa negara untuk mendanai kelangsungan hidup negara dan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan industri/sector ekstraksi sumber daya alam ini telah berhasil menjadikan Indonesia salah satu negara pengekspor minyak bumi (anggota OPEC). Selain itu, ekspor pertambangan juga menjadi andalan penghasil devisa negara. Selain mengembangkan industri penunjang pertanian, dalam rangka menciptakan lapangan kerja, industri pengganti barang impor juga dikembangkan untuk menekan inflasi dan memenuhi kebutuhan barang konsumsi secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi ini juga dibarengi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia, investasi besar-besaran di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar, dan di bidang kesehatan, memperluas pelayanan kesehatan ke seluruh pelosok tanah air. Pembangunan yang terlalu berorientasi pada ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem. Keberhasilan pembangunan ekonomi di atas pada akhirnya bermuara pada pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kapasitas produksi dan ambang batas serapan alam untuk limbahlimbah, baik padat, cair maupun udara. Country Natural Resources and Environment/CNREA (Bappenas, 2007) menyatakan bahwa jika pemanfaatan sumber daya alam masih bersifat ekstraktif dan dengan cara-cara kuno yang tidak ramah lingkungan dan ekosistem, maka Indonesia akan menghadapi tiga masalah besar di masa mendatang, yaitu krisis air, krisis pangan dan krisis energi. Konsep ekonomi hijau secara resmi diadopsi setelah UNEP mengeluarkan Green Economy Initiative (GEI) untuk mendorong negara-negara anggota PBB untuk menerapkan konsep ekonomi hijau. Sejalan dengan konsep ekonomi hijau, Bappenas meluncurkan Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) 2010-2029 untuk mengurangi potensi perubahan iklim untuk kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan (Kompaspedia, 2022).

Pada tahun 2012, tepat 20 tahun setelah Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Indonesia juga memprakarsai Global Green Growth Initiative (GGGI). Kewajiban ini kemudian diperkuat dengan UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Menegnai Perubahan Iklim). Aturan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam konsep Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dan menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Perpres 18/2020.

Strategi tersebut mencakup pembangunan rendah karbon, kebijakan emisi nol bersih dan pemberian insentif untuk mendorong implementasi ekonomi hijau yang lebih besar. Mengenai kebijakan pembangunan rendah karbon dan net-zero emisi, pemerintah telah merilis peta jalan untuk mencapai net-zero emisi pada tahun 2060, termasuk sektor hutan dan lahan pada tahun 2030. Langkah selanjutnya adalah serangkaian insentif hijau yang diberikan untuk mendorong implementasi yang lebih besar. dari ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Perpres 98/2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Mencapai Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Kompaspedia, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah

untuk menciptakan ekonomi hijau. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan rendah karbon merupakan andalan menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Upaya pemerintah Indonesia untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan ekonomi hijau didukung oleh beberapa langkah strategis. Komitmen ini didukung oleh alokasi anggaran melalui program APBN dan nonAPBN untuk mendanai program Ekonomi Hijau.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Anggaran iklim menyumbang rata-rata 4,1% dari APBN, di mana 88,1% di antaranya dihabiskan untuk infrastruktur hijau sebagai modal utama untuk mentransformasi perekonomian Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> tertuang dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan target Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional oleh hingga 2030. Indonesia menetapkan target nol emisi bersih untuk tahun 2060 atau lebih cepat jika mereka menerima dukungan internasional. Para ahli mendefinisikan Sumber Daya Manusia berdeda-beda diantaranya Menurut Fausito Cardoso Gomes (1997), "Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Dalam suatu organisasi perlu adanya suatu manajemen yang mengelola sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan organisasi".

Menurut Hadari Nawami yang dikutip oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003: 9) yang dimaksudkan sebagai sumber daya manusia meliputi tiga pengertian yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/nonfinansial) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi-potensi yang terkandung di alam semesta menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan manusia dalam mengatur tatanan masyarakat yang seimbang dan berkelanjutan. SDM juga dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi (Benjamin Bukit, MM. Dkk, 2017: 2).

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam konteks pembangunan ekonomi karena tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berhubungan dengan arus balik ekonomi. Pada umumnya, sumber daya manusia dipekerjakan sebagai pemikir, perencana dan penggerak untuk mencapai suatu tujuan. Sebagai contohnya sumber daya alam yang semula merupakan bahan mentah kemudian diolah oleh manusia menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga siap untuk dimanfaatkan. Sumber daya manusia juga termasuk kunci kesuksesan perekonomian termasuk di level negara (Rahima, 2021). Pada tahun 2019 global competitiveness report (2019) oleh World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia berada pada tingkat 50 dari 141 negara. Hal ini masih sedikit dibawah Malaysia dan Thailand, dan Singapura yang berada di peringkat pertama.

**Tabel 1.** *Global Competitiveness Report (2019) World Economic Forum*

Rank	Economy	Score (1)	Rank	Score
Singapore	1	84.8	+1	+1.3
Malaysia	27	74.6	-2	+0.2
Thailand	40	68.1	-2	+0.6
Indonesia	50	64.6	-5	-0.3

Kelangsungan pembangunan yang dilakukan sekarang di negara Indonesia, bagaimanapun hanya dapat dipertahankan bila kualitas SDM yang ada mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun dari kalangan swasta. Oleh karena itu, perlu pengembangan SDM di negara Indonesia mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, yang merupakan sumber produktif potensial sehingga dapat diubah menjadi sumber produktif yang nyata. Demikian pula perhatian yang semakin besar di Indonesia, terhadap manajemen oleh lembaga-lembaga swasta diharapkan akan mampu membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan perusahaan pada masa yang akan datang (Benjamin Bukit, MM. Dkk, 2017: 1).

Dalam rangka mencapai suatu kesuksesan perekonomian, sumber daya manusia yang dikembangkan pun tidak sembarangan. Melalui lembaga pendidikan formal, setiap tahunnya banyak menghasilkan lulusan yang siap untuk memasuki dunia kerja. Akan tetapi, jurusan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan adalah jurusan langka dimana proses rekrutmen yang begitu ketat, menyebabkan masih banyak sarjana muda menjadi pengangguran. Untuk lebih meminimalisasi pengangguran, pendidikan formal perlu didampingi dengan pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tekad dan membuat inovasi terbaru agar mental pencari kerja berubah menjadi penyedia lapangan kerja. Human Capital Index yang diterbitkan World Economic Forum melakukan pengukuran dan mengkuantifikasi kapasitas human capital negara-negara berkembang. Pengukuran dilakukan tidak hanya melalui evaluasi tingkat pendidikan, keterampilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan namun pada upaya negara-negara untuk memanfaatkan potensi tersebut bagi kepentingan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan (The Human Capital Forum). Laporan dari bank Dunia pada tahun 2020, Indonesia masih di bawah Vietnam, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Thailand. Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) dalam Skala Asia Tenggara Indonesia berada pada peringkat 6. Nilai HCI Indonesia adalah 0,54 tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara.

**Tabel 2.** *Human Capital Index 2020 (Southeast Asia)*

<b>Peringkat</b>	<b>(Asia Tenggara)</b>	<b>Negara HCI</b>
<b>1</b>	<b>Singapura</b>	<b>0,88</b>
<b>2</b>	<b>Vietnam</b>	<b>0,69</b>
<b>3</b>	<b>Brunei Darusalam</b>	<b>0,63</b>
<b>4</b>	<b>Malaysia</b>	<b>0,61</b>
<b>5</b>	<b>Thailand</b>	<b>0,61</b>
<b>6</b>	<b>Indonesia</b>	<b>0,54</b>
<b>7</b>	<b>Philipnes</b>	<b>0,52</b>
<b>8</b>	<b>Kamboja</b>	<b>0,49</b>
<b>9</b>	<b>Myanmar</b>	<b>0,48</b>
<b>10</b>	<b>Laos</b>	<b>0,46</b>
<b>11</b>	<b>Timor-Leste</b>	<b>0,45</b>

Jika ditelaah lebih mendalam terkait keunggulan sumber daya manusia yang ada di negaranegara Asia tenggara, ternyata Singapura merupakan satu negara yang sangat unggul dibidang sumber daya manusia dengan indeks 0,88 sampai dengan 0,90. Keunggulan ini sebanding dengan kesejahteraan yang ada di negara tersebut. Dan biasanya negara yang unggul sumber daya manusianya akan mampu mengolah berbagai sumber daya yang ada yang dimanfaatkan untuk pembangunan. SDM adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas human capital, yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan kesetaraan gender, dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain; bidang pendidikan, pemerintah percaya bahwa masyarakat tereduksi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi.

Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20 persen dari APBN 2018 di bidang pendidikan yaitu sebesar Rp 444 triliun. Pengalokasian APBN hingga 20 persen untuk sektor pendidikan merupakan komitmen serius Pemerintah untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran

pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidak terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional.

Dalam dua dekade terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) kian serius dan menakutkan. Terlebih, hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Seperti banjir, rob, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, dan lainnya terjadi dimana-mana. Sejumlah hasil analisis menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh semakin meluasnya kerusakan lingkungan yang di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih banyak berbasis pada sumber daya alam, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Sebut saja minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah, emas, dan sumber daya alam lainnya. Hal inilah yang menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan masih sering kali terabaikan sehingga menimbulkan beragam permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air dan/atau udara, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya.

Menurut Psikolog dan praktisi SDM industri energi Dony Indrawan Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah Indonesia yaitu berkaitan dengan kebijakan penyiapan dana, infrastruktur, kurikulum, dan penyiapan SDM potensial untuk pengembangan ilmu dan teknologi, termasuk riset-riset dan pemanfaatan praktik terbaik di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang berfokus pada energi baru dan terbarukan, serta pengembangan pemanfaatan energi fosil yang lebih maju dan ramah lingkungan.

Pemerintah, pemimpin bisnis, lembaga pendidikan, dan individu masing-masing harus memahami besarnya perubahan yang sedang berlangsung dan secara mendasar memikirkan kembali rantai nilai bakat global. Agar proaktif dalam menanggapi kebutuhan ekonomi, masyarakat, dan individu di masa depan, serta harus memikirkan kembali apa artinya belajar, apa artinya bekerja, dan apa peran berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa SDM mampu memenuhi potensi mereka ([www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)). Indonesia memainkan peran penting dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs), Deklarasi Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim, serta perlindungan kekayaan publik global. Dengan berbagai target itu, pemerintah Jerman mengucurkan miliaran Euro dana pembangunan bilateral. Antara 2011-2017 komitmen BMZ sebesar EUR 1,2 miliar diberikan untuk kerja sama pembangunan dua negara. Masih ditambah EUR1,8 miliar yang disiapkan terkait Bantuan Pembangunan Resmi (Official Development Assistance - ODA) yang disebut sebagai promotional loans dalam kerja sama finansial. Jumlah tersebut menjadikan Jerman sebagai mitra hubungan bilateral pembangunan terbesar ketiga Indonesia di dunia. Kerangka strategis untuk kerja sama ini adalah perjanjian internasional, sasaran dan prioritas pemerintah Indonesia, serta strategi sektor BMZ dengan acuan untuk topik lintas sektoral.

Rafael Teck, Counsellor for Development Cooperation, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta mengatakan bahwa seluruh kesuksesan ekonomi yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu panjang perlu pekerja yang terlatih, yang siap menuntaskan tugas yang dibebankan di masa depan. Menurutnya pendekatan pembangunan Indonesia cukup mengesankan, dan Kerja Sama Pembangunan Jerman bangga dapat bermitra dengan Indonesia dalam promosi peluang kerja, TVET dan pendanaan. Karena itu proyek ISED adalah bagian sangat penting dari dukungan Jerman untuk area prioritas yang sudah disepakati bersama yakni Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan TVET. Melalui semua jalur prioritas dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan TVET ini, pemerintah Jerman bertekad untuk mendukung promosi peluang kerja dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, sebagaimana prioritas utama Presiden Joko Widodo setelah terpilih untuk periode keduanya. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim pada tahun 2015. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030. Persetujuan ini mengawal negaranegara untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain untuk membatasi pemanasan global. Dalam persetujuan paris terdapat 25 pasal, berikut beberapa pasal yang relevansi dan menjadi dasar kerja sama teknik Indonesia – jerman diantaranya:

“Pasal 1 yang berbunyi untuk keperluan Persetujuan ini, definisi yang terkandung dalam Pasal 1 dari Konvensi wajib dilaksanakan. Sebagai tambahan: 1. “Konvensi” adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, diadopsi di New York pada 9 Mei 1992; 2. “Konferensi Para Pihak” adalah Konferensi Para Pihak pada Konvensi; 3. “Pihak” adalah suatu pihak pada Persetujuan ini”.

“Pasal 2 yang berbunyi persetujuan ini, dalam rangka meningkatkan implementasi Konvensi, termasuk tujuannya, bermaksud untuk memperkuat penanganan global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan”.

“Pasal 6 yang berbunyi para Pihak mengakui adanya sebagian Pihak yang memilih untuk melakukan kerja sama secara sukarela dalam implementasi kontribusi yang ditetapkan secara nasional guna mencapai ambisi yang lebih tinggi dalam aksi mitigasi dan adaptasinya dan mendorong pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang terpadu”.

“Pasal 9 yang berbunyi para Pihak dari negara maju wajib menyediakan sumber pendanaan untuk membantu Para Pihak dari negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan adaptasi guna melanjutkan kewajiban mereka yang telah ada berdasarkan Konvensi”.

“Pasal yang berbunyi 11 peningkatan kapasitas dalam Persetujuan ini perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan Para Pihak dari negara berkembang, khususnya negara-negara dengan kapasitas terendah, seperti Negara kurang berkembang, dan negara-negara yang secara khusus sangat rentan terhadap dampak merugikan dari perubahan iklim, seperti negara berkembang kepulauan kecil, untuk melakukan aksi perubahan iklim secara efektif, termasuk antara lain, untuk implementasi aksi adaptasi dan mitigasi, dan perlu memfasilitasi pengembangan, diseminasi dan penyebaran teknologi, akses terhadap pendanaan iklim, aspek-aspek pendidikan terkait, pelatihan dan kesadaran publik, dan komunikasi informasi yang transparan, tepat waktu dan akurat”.

“Pasal 12 yang berbunyi para Pihak wajib bekerja sama dalam mengambil upaya, apabila diperlukan, untuk meningkatkan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik mengenai isu perubahan iklim, partisipasi publik dan akses publik terhadap informasi, mengakui pentingnya langkah-langkah ini dalam rangka peningkatan aksi menurut Persetujuan ini”.

Proyek ISED dimulai Juli 2017 dan fokus pada dua sektor penting yang menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar yakni manufaktur dan pariwisata berkelanjutan dengan lokasi Pulau Jawa dan Lombok. Proyek ISED menerapkan pendekatan yang berorientasi pada sektor swasta dalam upaya implementasi promosi kerja layak serta mendukung kolaborasi antara industri dan usaha kecil menengah (UKM). Kerjasama Indonesia – Jerman dengan pendekatan yang berorientasi pada sektor swasta, periode implementasinya dari 01 Juli 2017-30 Juni 2021. Anggaran dana (Kontribusi Pemerintah Jerman) sebesar EUR7.500.000, dalam lingkup kerja:

1. Kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta.
2. Pembentukan aliansi untuk bisnis inklusif.
3. Pengembangan Keterampilan.
4. Implementasi dan replikasi pada tingkat nasional.

Kegiatan pelatihan yang diberikan proyek ISED tahap I dengan fokus utamanya adalah Manufaktur dan Pariwisata sebagai berikut:

1. Sektor manufaktur meliputi *Programmable Logic Controller* (PLC) dan pengembangan keterampilan digital dimana pengalaman yang didapat dari pelatihan termasuk wawasan dan pembelajaran diringkas dan diusulkan sebagai studi kasus dan rekomendasi implementasi dan replikasi pelatihan teknis dalam keterampilan untuk menjadi kebijakan di tingkat nasional. karena itu kementerian perindustrian berpotensi menjadi ujung tombak pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait.
2. Sektor pariwisata meliputi pelatihan tentang E-Commerce, pelatihan ISED untuk pengembangan soft skill, pelatihan model bisnis inklusif dalam rancangan desa pariwisata kebugaran, pelatihan

model bisnis inklusif untuk menggiatkan bisnis kopi lokal di desa Sajang dan pelatihan model bisnis inklusif pada sektor kuliner.

Indonesia memiliki salah satu tingkat konsumsi energi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan populasi yang signifikan, serta urbanisasi yang cepat. Penggunaan listrik tumbuh dengan cepat dan akan terus demikian. Permintaan diproyeksikan menjadi tiga kali lipat pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang mengikat secara hukum untuk Energi Terbarukan (ET) yang menetapkan bahwa 23 persen dari total pasokan energi primer negara harus berasal dari sumber ET pada tahun 2025. Tujuan akhirnya adalah 31 persen pada tahun 2050. Tak dipungkiri bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan energi terbarukan di Indonesia, baik aspek teknis, ekonomi, hingga isu keberlanjutan terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan off-grid. Oleh karenanya, program-program kerja sama Indonesia - Jerman ini dapat membantu Indonesia mengatasi tantangan dalam mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kapasitas nasional untuk mencapai target porsi energi baru terbarukan 23% pada tahun 2025. Untuk mempromosikan pentingnya pekerjaan ramah lingkungan demi pembangunan berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas Bersama *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* menyelenggarakan *Indonesia's Green Jobs Conference "The Future Starts Now"* sebagai bagian dari proyek kerja sama Indonesia-Jerman, Innovation and Investment for inclusive Sustainable Economic Development (ISED).

Konferensi yang di adakan secara virtual tanggal 8 Februari 2022 tersebut Direktur Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari menyampaikan bahwa Ekonomi hijau menjadi bagian penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang tidak hanya menasar perekonomian, namun juga mitigasi pemanasan global hingga penciptaan tenaga kerja dan investasi. strategi ketenagakerjaan dalam mendukung *Green Jobs* yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi komperhensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program pemerintah terkait lingkungan dan keberlanjutan.
2. Menyediakan paket stimulus (insentif dan disinsentif) untuk ekonomi hijau dan pengembangan *Green Jobs*. Contoh: insentif pajak untuk start-up dalam produk hijau.
3. Mengembangkan sistem yang memadai untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan dalam pekerjaan, termasuk identifikasi penawaran dan permintaan *Green Jobs*.
4. Mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk mendorong ekonomi hijau dan pengembangan *Green Jobs*.
5. Mendorong institusi TVET untuk mengadopsi aspek dan standar keberlanjutan. Dalam kurikulum mereka dengan memberikan insentif yang mendorong pengembangan keterampilan untuk *Green Jobs*.
6. Keterlibatan pengusaha yang lebih strategis dalam pengembangan keterampilan *Green Jobs* untuk menghasilkan persepsi serupa tentang perlunya *Green Jobs* (Dit. Lingkungan Hidup Bappenas (2021)).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan studi pustaka tentang hubungan kerjasama Indonesia – Jerman dalam pembangunan SDM dalam Green Economy sebagai point ketujuh SDGs, dapat disimpulkan, yang menjadi bentuk dan fokus kerjasama dalam proyek ISED antara Indonesia – Jerman di bagi dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pariwisata dan manufaktur, tahap yang kedua adalah bidang energi terbarukan. Dengan dicapai melalui mengembangkan SDM terampil bagi pekerjaan layak dan ramah lingkungan (*Green Jobs*) yang mendukung ekonomi hijau melalui strategi Green Economy. adapun Manfaat yang diperoleh kedua negara melalui proyek ISED yaitu hubungan diplomatik yang semakin erat. Dan keterdukungan proyek ISED terhadap poin ketujuh SDGs dapat dilihat dari tujuan dibentuknya proyek tersebut untuk tahap II yaitu mempromosikan lapangan kerja hijau di sektor energi, khususnya di bidang energi terbarukan.

Dalam penelitian ini yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki saran yaitu, untuk mencapai transisi Green Economy yang difokuskan pemerintah, maka disarankan bagi perusahaan batu bara untuk mengurangi ekspor batu bara dengan lebih memanfaatkan potensi energi terbarukan dan meningkatkan literasi masyarakat tentang energi hijau agar pemerintah lebih mudah mengajak masyarakat untuk menggunakan produk Green Economy.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andreas, Lako. 2015. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Am, Sari Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.4, Hal. 765-770 | 765. Penerapan Konsep Green Economy Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daniel S. Papp. 1988. Contemporary International Relation : A Framework for Understanding, Second Editions. New York: MacMillan Publishing Company.
- Dit. Lingkungan Hidup, Bappenas. 2021. "Strategi untuk mendukung Penerapan Green Jobs di indonesia.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (1997). Contending. Theories of International Relation: A Comprehensive Survey. (4th Edition ed.)
- Endah Murningtyas. 2014. Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Ekonomi Hijau untuk penerapan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang konkrit dan sistematis. Jakarta. Kementerian PPN/Bappenas.
- K. J. Holsti. 1995. International Politik : A Framework For Analisis . Englewood Cliffs: Prentice Hall International.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2012. Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya. Jakarta. Margono, S. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan Cet ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Milani, Brian, 2005. Designing The Green Economy: The Post Industrial Alternative To Corporate Globalization : Roman and Littfield Publishers, INC Moh.
- Nazir. 2003. Metodologi Penelitian Cet ke-3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert Jackson dan George Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- United Nation. 2009. UNEP Years book 2009 New Science and Development in Our Changing Environment. Division of Early Warning and Assesment.